CYBER CRIME DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Fransiska Novita Eleanora

Program Studi Ilmu Hukum, FH Universitas MPU Tantular

Jl Cipinang Besar No. 2 Jakarta Timur - 13410

Telp 021 8562011, 021 8197386

Abstract

Computer crime (cyber crime) is a crime which harm the consumers, especially in the field of commerce between business perpetrators and consumers. There are many insincerities happened in e-commerce related to transaction security and safety, like credit card piracy, stock exchange fraud, banking fraud, rights to intellectual properties, illegal to information system (hacking) destruction on the web site, up to the stealing and even deception. This condition results to many loss experienced by consumers, because they feel that their rights as consumers are not fulfilled by business perpetrators. This research Method is bibliography study. The result shows that the law of protection consumer ordinance (UUPK) cannot reach or give protection to consumers in particular which relates to cybercrime, because the law is assumed to be weak in doing the tackling and protection related to consumer rights.

Key Words: Cyber crime, Protection, Consumer right

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktifitas manusia dapat diatur oleh hukum. Hukum disini direduksi pengertiannya menjadi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara, begitu pula aktifitas kejahatan mayantara yang menjadikan internet sebagai sarana utamanya ini. Dalam kaitan dengan teknologi informasi khususnya dunia maya, peran hukum adalah melindungi pihak-pihak yang lemah terhadap eksploitasi dari pihak yang kuat atau berniat jahat, disamping itu hukum dapat pula mencegah dampak negatif dari ditemukannya suatu teknologi baru.

Akan tetapi pada kenyataannya hukum sendiri belum dapat mengatasi secara riil terhadap permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh teknologi khususnya teknologi informasi. Salah satu bukti kongkretnya adalah timbulnya berbagai kejahatan di dunia cyber yang ternyata belum bisa diatasi sepenuhnya oleh hukum. (Didik & Elisantris, 2005:36)

Saat ini berbagai upaya telah dipersiapkan untuk memerangi cyber crime. *The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* telah membuat para kebijakan yang berhubungan dengan computer related crime, dimana pada tahun 1986 OECD telah mempublikasikan laporannya yang berjudul "computer related crime: analysis of legal policy".

Di Indonesia sendiri, setidaknya sudah terdapat Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di gawangi oleh Direktorat Aplikasi Telematika Departemen Komunikasi dan Informatika. Subyek-subyek muatannya ialah menyangkut masalah

yurisdiksi, perlindungan hak pribadi, azas perdagangan secara e-commerce, azas persaingan usaha usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen, azas-azas hak atas kekayaan intelektual (IIAKI) dan hukum Internasional serta asas cyber crime.

Rancangan Undang-Undang tersebut mengkaji cyber case dalam beberapa sudut pandang secara komprehensif dan spesifik, fokusnya adalah semua aktivitas yang dilakukan dalam cyberspace untuk kemudian ditentukan pendekatan mana yang paling cocok untuk regulasi Hukum Cyber di Indonesia.

Jaringan komputer global pada awalnya digunakan hanya untuk saling tukar-menukar informasi, tetapi kemudian meningkat dari sekedar media komunikasi kemudian menjadi sarana untuk melakukan kegiatan komersil seperti informasi, penjualan dan pembelian produk.

Negara manapun tidak mungkin menghindari ini, selain harus mengikuti irama kemajuan dengan menjadikan kemajuan yang telah dicapai oleh negara lain sebagai pemacu dalam mengembangkan Teknologi Informasi di Indonesia. Hal itu sesuai dengan eksistensi kecenderungan pada masyarakat indonesia, adalah sebagai "follower".

Indonesia tidak tertinggal jauh dalam "kualitas", tapi memang tertinggal jauh dalam "kuantitas". kuantitas pun masih bisa di bilang cukup memadai jika diukur dari total penduduk Indonesia yang sudah mengenal teknologi inforamtika, dan bukan dari prosesntase pengguna teknologi informatika. (Riduan Syahrani, 2004:21)

Dalam konteks kualitatif, dengan akselerasi

macam apapun yg masih logis (dengan optimalisasi daya dan upaya), Indonesia akan tetap tertinggal. Maka ketertinggalan adalah bukan isu yang "essensial". Hal tersebut harus sudah diciptakan sejak dini, karena telah diakui oleh banyak pihak, teknologi informasi akan menjadi bagian aktifitas terpenting untuk menentukan keberhasilan individu dalam era mendatang yang serba digital.

Tulisan ini akan membahas sejauh mana UUPK memberikan perlindungan terhadap konsumen jika terjadi kerugian akibat *cyber crime*.

PEMBAHASAN

Cyber Crime

Para ahli berusaha untuk mendefinisikan permasalahan kejahatan komputer. Beberapa definisi mengenai kejahatan komputer atau penyalahgunaan komputer, antara lain:

"Setiap tindakan tidak sah yang memerlukan pengetahuan tentang teknologi komputer untuk perpretation nya, penyelidikan, atau penuntutan. Itu mempunyai dua kategori utama. Pertama-tama, komputer sebagai suatu alat dari kejahatan, seperti ditemukan, satu harta theaf... Ke dua, komputer adalah obyek dari kejahatan sabotase atau data perubahan,..."

Definisi ini diberikan oleh departemen kehakiman Amerika, bahwa penyalahgunaan komputer dibagi dua bidang utama. *Pertama*, penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan, seperti pencurian. *Kedua*, komputer tersebut merupakan obyek atau sasaran dari tindak kejahatan tersebut, seperti sabotase yang menyebabkan komputer tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Kemudian definisi yang dikemukakan oleh *Organization of European Community Development (OECD)*, bahwa:

"Perilaku yang tidak syah serta yang tidak berkenaan dengan pengolahan yang authomatic dan / atau transmisi data".

Dari definisi tersebut, kejahatan komputer ini termasuk segala akses ilegal atau secara tidak sah terhadap suatu transmisi data. Di sini terlihat bahwa segala aktifitas yang tidak sah dalam suatu sistem komputer merupakan kejahatan. (Asafa Endesman, 2007 : 52)

Seorang ahli dari Jerman, Sieber mengklasifikasikan kejahatan komputer dengan penipuan oleh manipulasi computer, spionase komputer dan pencurian perangkat lunak, sabotase computer, pencurian atau layanan, akses yang tidak syah kepada sistem pengolahan data, dan penyerangan oleh

pengolahan data.

Kemudian pendapat yang dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, beliau lebih memperluas pengertian dengan mengemukakan bahwa *pengertian kejahatan komputer adalah segala aktifitas tidak sah yang memanfaatkan komputer untuk tidak pidana*. Sekecil apapun dampak atau akibat yang ditimbulkan dari penggunaan komputer secara tidak sah atau ilegal merupakan suatu kejahatan.

Semua perumusan atau batasan yang diberikan mengenai kejahatan komputer (*computer crime*) atau penyalahgunaan komputer (*computer misuse*) secara umum dapat disimpulkan sebagai perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai alat/sarana untuk melakukan tidak pidana atau komputer itu sendiri sebagai objek tindak pidana. Dan dalam arti sempit kejahatan komputer adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan teknologi komputer yang canggih. (Abdul & Mohammad, 2009:17)

Dilihat dari definisi-definisi di atas ada beberapa subansi dari kejahatan komputer atau penyalahgunaan komputer yang hendak dibahas, yaitu: (1) Akses tidak sah dan Penggunaan secara tidak sah (*unauthorized access and unauthorized use*), (2) Penipuan dan pencurian informasi (*fraud and information theft*), dan (3) Pelanggaran- pelanggaran (*associated offence*).

Hak-Hak Konsumen

UU No. 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*. PBB Guidelines for Consumer Protection 1983, yang berbunyi:

"Konsumen dimanapun mereka berada dari segala bangsa, mempunyai dasar-dasar tertentu terlepas, dari kaya, miskin, ataupun status sosialnya".

Hak-hak dasar tersebut adalah: (1) **Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur.** Agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar dan jelas tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan / sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Informasi ini dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhannya. (2) **Hak untuk keamanan dan keselamatan.** Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam

penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis), apabila mengonsumsi suatu produk.

(3) **Hak untuk memilih.** Memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar, dan berhak untuk membuat keputusan untuk membeli barang sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Persaingan Usaha, menentukan bahwa: "Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi domain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk: a). Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas, b) Membatasi pasar dan pengembangan teknologi, c) Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan. (4) **Hak untuk didengar.** Hak konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau menghindarkan dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu, apabila informasi yang diberikan kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau berupa pernyataan pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat disampaikan baik secara perorangan maupun secara kolektif. (5) **Hak untuk mendapatkan ganti rugi.** Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga tidak wajar. Karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri, (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (*diluar pengadilan*) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan. (AZ. Nasution, 2001:38)

Perlindungan Terhadap Konsumen

CARE TRUST (*Singapura*), meyakinkan konsumen bahwa pengusaha akan mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi perdagangan tersebut dan memberikan hak kepada pengusaha untuk menggunakan "trustmark". Untuk perdagangan dengan tatap muka akan dikeluarkan "physical certification" sedangkan untuk perdagangan melalui internet akan dikeluarkan "web certification".

Dalam bidang perdagangan, Internet mulai

banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis karena kontribusinya terhadap efisiensi aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan elektronik commerce (*e-commerce*). E-commerce tersebut terbagi atas dua segmen yaitu *business to business e-commerce* (*perdagangan antar pelaku usaha*) dan *to consumer e-commerce* (*perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen*).

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPdata, sedangkan e-commerce pada dasarnya merupakan modal transaksi jual beli modern, yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi.

Beberapa permasalahan hukum yang muncul dalam bidang hukum dalam aktivitas e-commerce, antara lain: (1) Otentikasi subyek hukum yang membuat transaksi melalui internet, (2) Perjanjian berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum, (3) Obyek transaksi yang diperjualbelikan, (4) Mekanisme peralihan hak, (5) Hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi baik penjual, pembeli, maupun para pendukung, (6) Legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti, (7) Mekanisme penyelesaian sengketa, dan (8) Pilihan hukum dan forum peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa.

Dengan metode transaksi elektronik yang tidak mempertemukan pelaku usaha dan konsumen secara langsung dan tidak melihat secara langsung barang yang diinginkan bias menimbulkan permasalahan yang merugikan konsumen. Sebagai contoh adalah ketidaksesuaian jenis dan kualitas barang yang dijanjikan, ketidaktepatan waktu pengiriman barang atau ketidakamanan transaksi.

Faktor keamanan transaksi seperti keamanan metode pembayaran merupakan salah satu hal urgen bagi konsumen, masalah ini penting sekali diperhatikan karena terbukti bermunculan kasus-kasus dalam e-commerce yang berkaitan dengan keamanan transaksi, mulai dari pembajakan kartu kredit, stock exchange fraud, banking fraud, hak atas kekayaan intelektual, illegal ke system informasi (*hacking*) perusakan web site, sampai dengan pencurian bahkan penipuan. (Agus Rahardjo, 2002 : 64)

Beragam kasus-kasus yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan transaksi terutama factor keamanan, dalam e-commerce ini tentu sangat riskan, bagi para pihak terutama konsumen. Padahal jaminan keamanan transaksi e-commerce sangat diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen. Apabila hal tersebut terabaikan maka bias dipastikan akan terjadi pergeseran efektivitas transaksi e-commerce dari falsafah efisiensi menuju arah ketidakpastian yang akan

menghambat upaya pengembangan pranata e-commerce.

Dalam E-Commerce, perusahaan-perusahaan di internet (internet merchant), pada umumnya tidak memiliki alamat secara fisik di negara tertentu, hal mana akan menimbulkan masalah bagi konsumen untuk mengembalikan produk yang dipesan bila barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan.

Selain itu konsumen juga akan mengalami kesulitan memperoleh jaminan servis atas kerusakan barang yang dipesan dari perusahaan di internet tersebut, juga tidak ada perlindungan atas keamanan dan kerahasiaan data individual konsumen yang diberikan kepada perusahaan tersebut.

Bisa saja terjadi data tersebut dicopy dan digunakan untuk tujuan yang merugikan konsumen pemilik data, sebab walaupun kita memiliki undang-undang perlindungan konsumen, akan tidak cukup mampu mengatasi hal ini.

Di Indonesia, Perlindungan hak-hak konsumen dalam e-commerce masih rentan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang berlaku sejak tahun 2000 memang telah mengatur hak dan kewajiban bagi produsen dan konsumen, namun kurang tepat untuk diterapkan dalam e-commerce. Karakteristik yang berbeda dalam system perdagangan melalui internet tidak cukup tercover dalam UUPK tersebut. (Sutardo & Ramli, 2004:61)

Untuk itu perlu dibuat peraturan hukum mengenai cyberlaw termasuk di dalamnya tentang e-commerce agar hak-hak konsumen sebagai pelanggan internet khususnya dalam melakukan transaksi e-commerce dapat terjamin.

Perlindungan akan hak-hak konsumen sangat berkaitan dengan penegakan hukum, karena upaya penegakan hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum serta proses birokrasi pemerintahan.

Dalam menegakkan hukum terdapat 3 (tiga) Unsur yang harus diperhatikan, yaitu *kepastian hukum*, *kemanfaatan* dan *keadilan*. Unsur pertama adalah kepastian hukum, kepastian hukum merupakan kehendak setiap orang, bagaimana hukum harus berlaku atau diterapkan dalam peristiwa konkrit, kepastian hukum akan hak-hak konsumen berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum.

Unsur kedua adalah manfaat, karena hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Penanggulangan Cyber Crime

Kriminalitas siber (*cybercrime*) atau kriminalitas yang dilakukan di dalam dunia maya (*internet*) adalah tindak pidana criminal yang dilakukan pada teknologi internet (*cyberspace*), baik yang menyerang fasilitas umum didalam *cyberspace* ataupun kepemilikan pribadi, mengambil informasi individu ataupun perusahaan tanpa seizin pemiliknya yang digunakan untuk melakukan penipuan, penyebaran dan penggelapan. (Edmon Makarim, 2003:42)

Secara teknis tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi *off-line crime*, *semi on-line crime* dan *cybercrime*. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, perbedaan utama diantara ketiga jenis kejahatan tersebut adalah keterhubungan dengan jaringan informasi public.

Cybercrime merupakan perkembangan dari suatu tindak pidana dengan memanfaatkan teknologi komputer dan perkembangannya seiring dengan perkembangan teknologi informasi. *Cybercrime* tidak mengenal batasan teritorial, sehingga kebanyakan korban dari *cybercrime* umumnya tidak mengetahui dan terlibat interaksi langsung dengan pelakunya.

Menurut *motifnya*, kejahatan diinternet dibagi menjadi dua motif yaitu: (1) **Motif Intelektual**. Kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan diri pelaku tujuannya adalah membuktikan kemahiran dibidang komputer atau sistem informasi khususnya kemahiran dalam menembus pertahanan jaringan komputer dan biasanya pelaku ikut dalam komunitas-komunitas hacker. (2) **Motif ekonomi, politik dan kriminal**. Kejahatan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu yang akan berdampak pada kerugian ekonomi dan politik pada pihak lain.

Kejahatan komputer juga dapat ditinjau dalam ruang lingkup sebagai berikut: *Pertama*, komputer sebagai instrumen untuk melakukan kejahatan tradisional, *Kedua*, komputer dan perangkatnya sebagai objek penyalahgunaan, dimana data-data didalam komputer yang menjadi objek kejahatan dapat saja diubah, dimodifikasi, dihapus atau diduplikasi secara tidak sah. *Ketiga*, Penyalahgunaan yang berkaitan dengan komputer atau data, dan *Keempat*, adalah *unauthorized acquisition, disclosure or use of information and data*, yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan hak akses dengan cara-cara yang ilegal.

Tidak ada jaminan keamanan di *cyberspace*, dan tidak ada sistem keamanan komputer yang mampu secara terus menerus melindungi data yang ada di dalamnya. Para hacker akan terus mencoba untuk menaklukkan sistem keamanan yang paling canggih,

dan merupakan kepuasan tersendiri bagi hacker jika dapat membobol sistem keamanan komputer orang lain. (Subekti, 2004:54)

Penanggulangan *cybercrime* dapat dilakukan dengan 2 (dua) strategi, yakni: **Strategi Jangka Pendek.** (1) penegakan hukum pidana: salah satu manivestasi untuk membuat hukum tidak hanya sebagai barang hukum tidak hanya sebagai barang rongsokan yang tidak berguna, (2) mengoptimalkan UU khusus lainnya. *Sector cyber space* banyak bersentuhan dengan sektor-sektor lain yang telah memiliki aturan khusus dalam pelaksanaannya. Ada beberapa aturan yang bersentuhan dengan dunia cyber yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cybercrime*, sehingga sepak terjangnya semakin sempit, dan (3) rekrutment aparat penegak hukum. Diutamakan dari masyarakat yang menguasai dunia komputer dan internet di samping kemampuan lain yang dipersyaratkan. **Strategi Jangka Menengah.** (1) *Cyber police*: orang-orang khusus yang dilatih dan dididik untuk melakukan penyidikan *cybercrime*. Pola pembentukannya merupakan bagian dari upaya reformasi kepolisian, (2) **Kerjasama internasional.** Hal ini dikarenakan kejahatan modern sudah melintasi batas-batas negara yang dilakukan berkat dukungan teknologi, sistem komunikasi, dan transportasi. Hal ini dapat menunjukkan adanya sistem kepolisian yang terbuka, dan mendapatkan keuntungan dalam kerjasama mengatasi penjahat-penjahat internasional yang masuk melintasi wilayah hukum Indonesia. **Strategi Jangka Panjang** (Sutarman, 2007:22). (1) **Membuat UU *cybercrime*.** Tujuannya adalah untuk pemberatan atas tindakan pelaku agar dapat menimbulkan efek jera dan mengatur sifat khusus dari sistem pembuktian, (2) **Membuat perjanjian bilateral.** Media internet adalah media global, yang tidak memiliki batasan waktu dan tempat. *Cybercrime* dapat melibatkan beberapa negara, dan (3) **Peran serta Masyarakat,** yang ikut serta dalam menanggulangi adanya kejahatan *cybercrime*, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak konsumen.

SIMPULAN

Kejahatan komputer (*cyber crime*), merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merugikan konsumen, khususnya akan hak-hak konsumen. Dimana penegakan hukum terhadap hak-hak konsumen belum mendapatkan kepastian hukum yang optimal dan memadai.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999, belum dapat menjerat pelaku terhadap kejahatan komputer (*cyber crime*), sehingga UU ini dianggap masih lemah dan belum memadai dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

Perlu diadakannya perubahan, dari UUPK yang mengatur tentang hak-hak konsumen, mekanisme pelaksanaan serta prosedur yang jelas, berkaitan dengan pelanggaran hak-hak konsumen dibidang *cyber crime*.

Perlu adanya Koordinasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat, mengenai pelanggaran atau kejahatan komputer (*cybercrime*)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid & Mohammad Labib, 2009, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Asafa Endesman, 2007, *Hukum e-commerce Dan Internet Dengan Fokus di Asia Pasifik*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Ahmad Sutardo dan M. Ramli, 2004, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- AZ. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- Dikdik M Aricf Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung : Refika Aditama.
- Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 2004, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung Alumni.
- Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Sutarman, 2007, *Cyber Crime, Modus Operandi Dan Penanggulangannya*, Laksbang Pressindo Yogyakarta
- UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*